



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

DIVISI PELAYANAN HUKUM

DIVISI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN EDISI PEKAN PERTAMA JANUARI 2026



**Awali Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti
Apel Pagi Bersama ASN Kementerian Hukum**

KEMENKUM KALSEL SEPEKAN



**Predikat WBK Diraih, Kanwil Kemenkum
Kalsel Tegaskan Komitmen Integritas**



**Kakanwil Kemenkum Kalsel Dorong
Integritas, Akuntabilitas, dan Kualitas
SDM pada Pengarahan Tusi 2026**

Kunjungi laman kami



kalsel.kemenkum.go.id

Terhubung lebih dekat:

YouTube Instagram X **KEMENKUMKALSEL**

Awali Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Apel Pagi Bersama ASN Kementerian Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Apel Pagi Bersama Awal Tahun 2026 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual, Senin (5/1/2026). Kegiatan ini diikuti dari Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Apel pagi bersama tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta diikuti oleh CPNS, PPPK, PPNPN, dan peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta dalam amanatnya menegaskan pentingnya menindaklanjuti capaian kinerja yang telah diraih sepanjang tahun 2025 sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Apa yang telah kita peroleh di tahun 2025 harus kita tindak lanjuti, terutama capaian-capaian kinerja yang merupakan hasil kerja seluruh jajaran Kementerian Hukum. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk melangkah lebih baik di tahun 2026,” ujar Nico Afinta.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa Apel Pagi Bersama Awal Tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat semangat kebersamaan dan komitmen kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Arahan Sekretaris Jenderal menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadikan capaian tahun sebelumnya sebagai pijakan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di tahun 2026,” ujar Alex Cosmas Pinem.

SENIN, 05 JANUARI 2026



Ia menambahkan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh program Kementerian Hukum secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Apel Pagi Bersama Awal Tahun 2026 ASN Kementerian Hukum RI di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi awal penguatan komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tahun 2026.



Awali Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Coffee Morning Perkuat Sinergi Kinerja



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengawali tahun 2026 dengan menggelar kegiatan Coffee Morning sebagai forum koordinasi internal dan penyelarasan program kerja, Senin (5/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan diikuti oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, serta Pejabat Non-Manajerial.

Dalam suasana santai namun tetap fokus, Coffee Morning dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi singkat pelaksanaan tugas di tahun 2025 sekaligus penyampaian arah kebijakan dan target kinerja tahun 2026. Kakanwil menekankan pentingnya memulai tahun dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah. Kita harus memastikan seluruh program kerja berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing bidang menyampaikan gambaran umum rencana kerja awal tahun, termasuk program prioritas, strategi peningkatan layanan, serta langkah-langkah penguatan kinerja organisasi. Diskusi juga mencakup optimalisasi administrasi, inovasi pelayanan, dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan akuntabel.

Kakanwil turut mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi dalam menghadapi tantangan di tahun 2026. Ia berharap Coffee Morning dapat terus menjadi ruang komunikasi terbuka guna mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergi antar bidang.

SENIN, 05 JANUARI 2026



Melalui kegiatan Coffee Morning ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen mengawali tahun 2026 dengan semangat baru, koordinasi yang lebih solid, serta kesiapan penuh dalam mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang prima dan berintegritas.



Sosialisasi LHKASN Jadi Langkah Awal Pembinaan CPNS dan PPPK di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Wajib Lapor (WL) baru, khususnya CPNS dan PPPK, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Senin (05/01).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Analis Aparatur Sumber Daya Manusia Ahli Madya, Eko Herdianto, beserta jajaran, sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman ASN terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan sejak awal masa pengabdian.

Sosialisasi menghadirkan Muhammad Harry Nugraha sebagai narasumber yang memberikan pemaparan secara langsung terkait kebijakan, mekanisme, serta teknis pengisian dan penyampaian LHKASN. Materi disampaikan secara komprehensif, mulai dari dasar hukum kewajiban LHKASN, kriteria Wajib Lapor, tahapan pengisian laporan, hingga batas waktu penyampaian yang harus dipatuhi oleh CPNS dan PPPK.

Dalam arahannya, Eko Herdianto menekankan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKASN merupakan bagian penting dari penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas ASN. LHKASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terjadinya praktik korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Peserta sosialisasi mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi, khususnya terkait kendala teknis yang berpotensi muncul dalam proses pengisian LHKASN. Melalui forum ini, diharapkan seluruh Wajib Lapor baru dapat memahami kewajibannya dengan baik dan mampu menyampaikan LHKASN secara tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku.

SENIN, 05 JANUARI 2026



Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam membangun budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan taat regulasi sejak tahap awal pengangkatan.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Dorong Integritas, Akuntabilitas, dan Kualitas SDM pada Pengarahan Tusi 2026



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pengarahan Tugas dan Fungsi (Tusi) dalam rangka mengawali pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat manajerial dan non manajerial, seluruh pegawai outsourcing, serta Peserta Pemagangan Nasional Batch III Kementerian Hukum, Selasa (6/1/26).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dalam arahannya mengawali dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja maksimal sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa kerja keras dan kolaborasi seluruh pegawai telah membuahkan hasil positif, salah satunya dengan diraihnya prestasi sebagai Kantor Wilayah terbaik ke-3 dalam capaian kinerja pada kegiatan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum pada Desember 2025 yang lalu.

Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk menghadapi tahun 2026 dengan penuh optimisme dan semangat meningkatkan kinerja. Ia juga menyoroti proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan, khususnya dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Menurutnya, seluruh jajaran harus tetap menjaga integritas dan kualitas kerja sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Di awal tahun 2026 ini kita menunggu hasil proses reformasi birokrasi menuju WBK. Saya optimis Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meraih hasil terbaik, dengan catatan seluruh jajaran terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja,” tegas Alex Cosmas Pinem.

Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang semakin baik, transparan, dan akuntabel di tahun 2026. Setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan memiliki kejelasan output dan outcome sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa kinerja yang baik tidak hanya berdampak pada reputasi organisasi, tetapi juga pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Dalam rangka penguatan perencanaan kinerja, Kakanwil juga menyampaikan bahwa ke depan akan dilakukan penandatanganan janji kinerja, sehingga seluruh rencana kerja dapat disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, memberikan pengarahannya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum, khususnya yang berkaitan dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan yang cepat, tepat, dan berdampak pada kebutuhan masyarakat.

SELASA, 06 JANUARI 2026



Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, turut memberikan pengarahannya terkait tugas dan fungsi di bidang perancangan produk hukum, analisis hukum, hingga penguatan peran dan kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di daerah.

Kegiatan pengarahannya ini juga diisi dengan sesi diskusi antara pegawai dan pimpinan yang berlangsung interaktif dan penuh semangat. Diskusi tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang semakin optimal di tahun 2026.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2026



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum seluruh Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti. Dalam arahannya, Rahmi Widhiyanti menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan langkah strategis untuk membangun budaya sadar risiko di seluruh level organisasi.

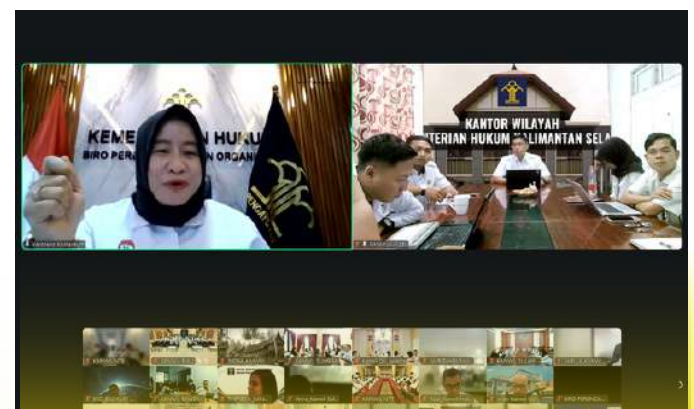
Ia menyampaikan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, khususnya dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan tujuan strategis Kementerian Hukum.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan serta mekanisme identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi. Penerapan manajemen risiko diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan meminimalkan potensi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

RABU, 07 JANUARI 2026



Kanwil Kemenkum Kalsel menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya pada pengelolaan perencanaan anggaran dan pelaporan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.



Dorong Indikasi Geografis Balangan, Kemenkum Kalsel Terima Konsultasi Disperindag



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan konsultasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis, Senin (8/1/2026).

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan konsultasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis, Senin (8/1/2026).

Kegiatan berlangsung di Ruang BerAkhlak Kanwil Kemenkum Kalsel. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai prosedur pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap potensi unggulan Kabupaten Balangan, antara lain Indikasi Geografis bambu tirik, sasirangan khas Balangan, serta motif baru piring.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan alam dan budaya daerah agar memiliki nilai tambah serta kepastian hukum.

“Kabupaten Balangan memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Potensi tersebut perlu segera didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis, agar terlindungi secara hukum dan tidak diklaim oleh pihak lain,” ujar Meidy Firmansyah.

Ia juga menyampaikan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Melna Sujiati, menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa hingga saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki produk yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis, sehingga konsultasi ini menjadi langkah awal yang strategis. Selain itu, disampaikan pula rencana peninjauan kerja sama dengan pihak CSR, yaitu PT Adaro, dalam rangka pemajuan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel memaparkan pentingnya Indikasi Geografis serta menjelaskan tahapan dan prosedur pendaftarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAMIS, 08 JANUARI 2026



Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel turut memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme lanjutan permohonan, persyaratan administratif, serta dokumen pendukung yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap terjalin sinergi yang semakin kuat dengan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mempercepat pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual, sekaligus mendukung pengembangan potensi daerah berbasis kearifan lokal.



Kemenkum Kalsel Ikuti Penandatanganan Komitmen Bersama ZI dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara virtual kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Hukum, yang diselenggarakan pada Selasa (8/1/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Graha Pengayoman dan diikuti seluruh satuan kerja Kementerian Hukum di tingkat pusat maupun wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di Graha Pengayoman, sementara jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel mengikuti secara virtual dari Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel. Turut hadir secara virtual para Kepala Divisi, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta CPNS dan PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen bersama dan perjanjian kinerja merupakan langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

“Ini adalah bentuk komitmen nyata Kementerian Hukum, baik di tingkat pusat hingga wilayah, untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Nico Afinta.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum RI, serta arahan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo yang menekankan pentingnya peningkatan nilai integritas dan pencegahan korupsi di seluruh lini organisasi. Arahan juga disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih terkait penguatan kualitas pelayanan publik.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam arahannya menegaskan pentingnya transformasi birokrasi melalui semangat Transformasi Melayani Negeri, guna memastikan pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Momentum utama kegiatan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Tahun 2026, serta penyerahan sertifikat penghargaan bagi satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang menerima penghargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa hasil survei dari KPK hingga Kementerian PANRB menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan dan dipercaya oleh masyarakat.

“Transformasi digital harus terus kita dorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel,” tegas Supratman.

KAMIS, 08 JANUARI 2026



Menanggapi kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa pencapaian predikat WBK merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, sekaligus menjadi penguat komitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kinerja pelayanan hukum di Kalimantan Selatan.

“Kami menjadikan penandatanganan komitmen bersama ini sebagai pengingat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.



Kementerian Hukum Sukses Melalui Kebersamaan (SEMAR), Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Arahannya



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta pada Kamis (08/01) yang mendorong penguatan budaya kerja melalui semangat Kementerian Hukum Sukses Melalui Kebersamaan (SEMAR) sebagai fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam arahnya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sistem kerja, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, integritas, dan profesionalisme. Konsep SEMAR dipaparkan sebagai kerangka nilai yang komprehensif, yang mencakup penguatan Spiritual Quotient (SQ), Emotional Quotient (EQ), dan Intelligence Quotient (IQ) sebagai satu kesatuan utuh.

Nilai ALUS (Setia dan Tulus) ditekankan sebagai landasan moral aparatur. Kesetiaan terhadap institusi serta ketulusan dalam melaksanakan tugas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan marwah Kementerian Hukum.

Selanjutnya, aparatur didorong untuk menginternalisasi nilai SAREH (Sabar, Rendah Hati, dan Humoris). Nilai ini diharapkan mampu membentuk karakter aparatur yang adaptif, mampu mengelola emosi secara positif, serta membangun hubungan kerja yang harmonis di lingkungan organisasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal menegaskan pentingnya nilai ABI (Arif dan Bijaksana) dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Aparatur dituntut untuk berpikir cerdas, bertindak tepat, serta mampu menyikapi setiap tantangan secara profesional dan proporsional.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa nilai-nilai SEMAR sangat relevan untuk terus ditanamkan dalam budaya kerja aparatur di daerah.

“SEMAR bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi pedoman sikap dan perilaku seluruh pegawai. Dengan menjunjung nilai ALUS, SAREH, dan ABI, kita dapat membangun kebersamaan yang kuat, meningkatkan kualitas kinerja, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin humanis dan profesional bagi masyarakat,” ujar Alex Cosmas Pinem.

KAMIS, 08 JANUARI 2026



Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik pada aspek pelayanan publik, pembinaan internal, maupun koordinasi lintas sektor. Diharapkan, penguatan budaya kerja berbasis SEMAR ini dapat menjadi energi positif dalam mewujudkan Kementerian Hukum yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.



Predikat WBK Diraih, Kanwil Kemenkum Kalsel Tegaskan Komitmen Integritas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara virtual kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Hukum, yang diselenggarakan pada Selasa (8/1/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Graha Pengayoman dan diikuti seluruh satuan kerja Kementerian Hukum di tingkat pusat maupun wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di Graha Pengayoman, sementara jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel mengikuti secara virtual dari Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel. Turut hadir secara virtual para Kepala Divisi, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta CPNS dan PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen bersama dan perjanjian kinerja merupakan langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

“Ini adalah bentuk komitmen nyata Kementerian Hukum, baik di tingkat pusat hingga wilayah, untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Nico Afinta.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum RI, serta arahan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo yang menekankan pentingnya peningkatan nilai integritas dan pencegahan korupsi di seluruh lini organisasi. Arahan juga disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih terkait penguatan kualitas pelayanan publik.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam arahannya menegaskan pentingnya transformasi birokrasi melalui semangat Transformasi Melayani Negeri, guna memastikan pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Momentum utama kegiatan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Tahun 2026, serta penyerahan sertifikat penghargaan bagi satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang menerima penghargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa hasil survei dari KPK hingga Kementerian PANRB menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan dan dipercaya oleh masyarakat.

KAMIS, 08 JANUARI 2026



“Transformasi digital harus terus kita dorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel,” tegas Supratman.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa pencapaian predikat WBK merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, sekaligus menjadi penguat komitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kinerja pelayanan hukum di Kalimantan Selatan.

“Kami menjadikan penandatanganan komitmen bersama ini sebagai pengingat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.



Perkuat Perencanaan dan Sinergi, Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Rencana Kegiatan 2026



Banjarmasin, Yankum_Info – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2026, Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Rencana Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum Tahun 2026, bertempat di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kamis (8/1).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Riswandi, serta jajaran staf Bidang AHU dan KI.

Dalam arahannya, Meidy Firmansyah menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan guna memastikan seluruh program dan kegiatan Divisi Pelayanan Hukum Tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan pimpinan dan target kinerja kantor wilayah. Ia juga menekankan perlunya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan rencana yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Perencanaan yang matang akan menentukan kualitas pelaksanaan program ke depan. Oleh karena itu, setiap usulan kegiatan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, didukung dengan perencanaan anggaran yang realistis serta mitigasi risiko yang jelas,” ujar Meidy.

Selanjutnya, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, memaparkan kebutuhan dan alokasi anggaran Bidang AHU Tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh rencana kegiatan dan penganggaran selaras dengan prioritas kebijakan pimpinan serta target kinerja tim kerja, sekaligus mengoptimalkan sinergi antar bidang untuk menghindari duplikasi kegiatan dan penggunaan anggaran.

Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, menyampaikan bahwa arah pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual. Stakeholder yang dimaksud antara lain pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas kreatif, hingga sentra industri. Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi rencana kegiatan dengan rencana strategis instansi dan kebijakan pimpinan.

KAMIS, 08 JANUARI 2026



Melalui rapat ini, Divisi Pelayanan Hukum berupaya mematangkan usulan program dan kegiatan masing-masing bidang agar lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.

Rencana kegiatan yang telah disusun selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**